

Strategi Indonesia Dalam Merespon Pelemahan Pengaruh Amerika Serikat Dan Peningkatan Pengaruh Tiongkok Dalam Bidang Ekonomi

Carmela Andrena

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Carmelaandren15@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di ASEAN dan memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, termasuk manufaktur, digital, dan sumber daya alam. Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keseimbangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, demi menghindari ketergantungan penuh pada salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya pengaruh Amerika Serikat di Indonesia dan mengeksplorasi strategi Tiongkok dalam memperkuat posisinya di negara tersebut. Selain itu, penelitian ini ingin memahami bagaimana Indonesia menggunakan strategi hedging untuk menyeimbangkan hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kebijakan proteksionis AS, seperti tarif impor tinggi dan persyaratan perdagangan yang ketat, mengurangi akses Indonesia ke pasar AS dan daya tarik investasi, mendorong Indonesia untuk mendiversifikasi mitra ekonomi. Tiongkok berhasil memperkuat pengaruhnya di Indonesia melalui berbagai strategi yang berfokus pada diplomasi ekonomi, kerja sama infrastruktur, dan soft power. Kesimpulan penelitian ini didapatkan bahwa posisi Indonesia dalam persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan dalam menghadapi perubahan geopolitik global. Hasil penelitian ini mempertegas pentingnya strategi hedging bagi negara-negara yang berada dalam posisi serupa, di mana persaingan antara kekuatan besar bisa menjadi peluang sekaligus tantangan.

Kata Kunci: Pengaruh Amerika Serikat, pengaruh Tiongkok, ekonomi Indonesia, Hedging

ABSTRACT

Indonesia is one of the largest economies in ASEAN and possesses significant potential in various sectors, including manufacturing, digital, and natural resources. As the leading economic power in the region, Indonesia has a strategic interest in maintaining a balance between the United States and China to avoid full dependency on either. This study aims to analyze the factors behind the declining influence of the United States in Indonesia and to explore China's strategies in strengthening its position in the country. Additionally, it seeks to understand how Indonesia employs hedging strategies to balance its relations with these major powers and their impact on Southeast Asia's regional stability. U.S. protectionist policies, such as high import tariffs and stringent trade requirements, have reduced Indonesia's access to U.S. markets and investment appeal, prompting Indonesia to diversify its economic partners. Meanwhile, China has successfully strengthened its influence in Indonesia through strategies emphasizing economic diplomacy, infrastructure cooperation, and soft power. In conclusion,

this study finds that Indonesia's position in the rivalry between the United States and China reflects flexibility and resilience in navigating global geopolitical shifts. The findings highlight the importance of hedging strategies for countries in similar positions, where great power competition presents both opportunities and challenges.

Keywords: *United States influence, Chinese influence, Indonesia's economy, Hedging*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai kekuatan menengah Asia berupaya menavigasi dan mengelola dinamika kekuatan global sebagai bagian dari persepsi mereka tentang tatanan internasional. Indonesia telah melakukan keterlibatan aktif dengan kekuatan besar sejak tahun-tahun awal kemerdekaannya. Keterlibatan aktif ini mencerminkan aspirasi kekuatan menengah Asia untuk mengamankan otonomi mereka dalam politik internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai kekuatan menengah Asia lebih menyukai konsepsi tatanan internasional yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan memperoleh manfaat yang diperlukan dari kekuatan yang lebih besar dalam politik internasional (Umar, 2023). Dalam upaya tersebut, Indonesia juga berambisi untuk memperkuat posisinya dalam hubungan dengan negara maju serta memperluas pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan global (Arifin et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat posisinya di kawasan dengan mengusulkan konsep Indo-Pasifik kepada berbagai pemangku kepentingan regional. Upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan peluang sekaligus mengurangi potensi ancaman yang timbul dari persaingan antar kekuatan besar. Melalui strategi ini, Indonesia berusaha membentuk tatanan keamanan dan kerja sama ekonomi yang lebih terbuka serta inklusif, sehingga kepentingan negara-negara menengah tetap mendapat perhatian dalam perubahan lanskap geopolitik global (Mubah, 2019a).

Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Asia Tenggara, Menko Airlangga menyampaikan pada Triwulan I - 2024, Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,11%, angka tersebut mencatatkan pertumbuhan Triwulan I yang tertinggi sejak tahun 2015. Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain

seperti Malaysia (3.9%), South Korea (3.4%), Singapura (2.7%), dan Meksiko (1.6%) (Moegiarsa, 2024). Oleh karena itu, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keseimbangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang selama beberapa dekade ini sedang saling menunjukkan taringnya di dunia internasional.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) yang identik dengan imperialisme telah lama menjadi perhatian utama dalam studi hubungan internasional, hal ini sempat menghantui Indonesia selama beratus-ratus tahun lamanya. Maka, dalam kerja sama hubungan negara lain, Indonesia lebih condong dekat dengan China sebagai representasi dari Blok Timur. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, diperkirakan adanya penurunan hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dikarenakan beberapa langkah yang diambil Indonesia, seperti kerja sama dengan Tiongkok dalam sektor ekonomi, serta keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengintervensi dominasi AS dalam PT Freeport Indonesia dengan membeli 51% sahamnya, menunjukkan perubahan arah kebijakan. PT Freeport sendiri dianggap sebagai representasi dari kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat di Indonesia (Ghifari, 2019).

Adanya pergantian pemerintahan Amerika Serikat menimbulkan perbedaan pengambilan kebijakan politik luar negeri. Persoalan ini menciptakan tantangan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kebijakan Amerika Serikat dirancang untuk melindungi kepentingan domestik dan mempertahankan dominasi terhadap rivalnya. Selama kepemimpinan Donald Trump, fokus utamanya adalah meningkatkan stabilitas ekonomi global, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan, mengurangi pengangguran, dan mempererat hubungan dengan mitra. Sebaliknya, kebijakan Joe Biden lebih multilateral, mengutamakan diplomasi, membangun aliansi dengan negara demokratis, memperjuangkan hak asasi manusia, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi global untuk memperkuat posisi AS di kancah internasional (Dewi, 2023).

Setelah masa kepemimpinan Joe Biden berakhir, Donald Trump berhasil memenangkan kembali pemilihan presiden Amerika Serikat dan akan dilantik pada 20 Januari mendatang. Meskipun belum resmi menjabat, Trump telah mengeluarkan sejumlah pernyataan yang mengguncang tatanan global, termasuk kebijakan perang

tarif yang direncanakan. Tindakan ini tentunya meningkatkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional dan berisiko mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia (Grehenson, 2025). Tindakan Donald Trump yang berpotensi mengubah tatanan perdagangan internasional, khususnya dengan kebijakan perang tarif yang direncanakan, tentu akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia perlu segera mengadopsi strategi yang lebih fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian global tersebut. Strategi Hedging memaksimalkan potensi kerja sama dengan Tiongkok yang semakin kuat, tanpa meninggalkan peran serta hubungan yang telah terjalin dengan Amerika Serikat. Strategi diplomasi yang cerdas akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional, sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan iklim ekonomi internasional.

Sejalan dengan ambisi besar Tiongkok untuk menjadi kekuatan utama yang dapat menyaingi Amerika Serikat, yang mendorongnya memperluas pengaruh ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Tiongkok di utara. Asia Tenggara, yang dihuni oleh rumpun Melayu, memiliki posisi penting dengan perbatasan Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Teluk Benggala dan anak benua India di barat, dan seluruh negara di kawasan ini tergabung dalam ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Dalam mencapai ambisi tersebut, Tiongkok menghadapi tantangan domestik dan internasional yang kompleks, serta sorotan dunia terhadap upayanya memainkan peran sentral di panggung global (Khoirunnisa, 2022).

Tiongkok menunjukkan ambisinya untuk menandingi Amerika Serikat melalui pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Tiongkok menerapkan kebijakan pintu terbuka, fenomena ini juga dikenal sebagai *the Rise of China*, yaitu kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global pada abad ke-21. Kebangkitan ini merupakan hasil dari reformasi ekonomi yang dimulai pada era Deng Xiaoping (1978–1987), ketika kebijakan pintu terbuka diterapkan untuk mendorong modernisasi ekonomi berbasis pasar. Reformasi tersebut membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi nasional Tiongkok, menjadikannya salah satu pemain utama dalam perekonomian global. Menurut data IMF tahun 2014, Tiongkok bahkan berhasil melampaui Amerika Serikat dalam kontribusi terhadap PDB dunia, dengan

menyumbang 17 persen, sementara AS hanya mencapai 16 persen (Tri Andika & Nur Aisyah, 2017).

Angka ini juga tercermin dalam data GDP tahun 2023, yang menunjukkan bahwa Tiongkok berada di posisi teratas dengan angka 5,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya mencatatkan angka 2,9% (International Monetary Fund, n.d). Meskipun Amerika Serikat masih memimpin dalam hal GDP Nominal, laju pertumbuhan GDP PPP Tiongkok yang semakin pesat menunjukkan potensi bahwa Tiongkok bisa saja menggeser posisi Amerika Serikat dalam GDP Nominal di masa depan.

Sebagai bagian dari strategi ekspansi pengaruhnya, Tiongkok tidak hanya memperluas pengaruh politik dan ekonominya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga aktif membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan ini, termasuk Indonesia. Berbagai langkah konkrit Tiongkok dalam memperkuat posisinya adalah melalui berbagai proyek investasi besar di Indonesia, yaitu pembangunan sektor infrastruktur dalam proyek BRI (*Belt and Road Initiative*) dan KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandung), pembangunan energi hijau, investasi bidang pendidikan, dan bantuan Vaksin Covid-19. Kebijakan investasi Tiongkok juga cenderung lebih fleksibel, dengan tidak adanya syarat yang rumit serta tanpa adanya intervensi dalam urusan politik domestik Indonesia.

Namun, Indonesia harus bijaksana dalam menavigasi dinamika hubungan ini, mengingat pentingnya Amerika Serikat sebagai mitra keamanan dan kekuatan global. Dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia mengadopsi strategi hedging yang mengedepankan keseimbangan antara kedua kekuatan besar ini. Strategi ini bertujuan untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada satu negara saja, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya mengandalkan investasi Tiongkok, tetapi juga berusaha memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat melalui berbagai forum internasional dan kerja sama ekonomi. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada di kedua belah pihak sambil menjaga kedaulatan dan stabilitas ekonomi nasional.

Penelitian ini membahas strategi Indonesia dalam menghadapi perubahan dinamika kekuatan global, dengan fokus pada melemahnya dominasi Amerika Serikat di bidang ekonomi serta meningkatnya pengaruh Tiongkok. Kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap menurunnya pengaruh Amerika Serikat di Indonesia, seperti perubahan kebijakan ekonomi global, penurunan investasi langsung, dan persaingan geopolitik. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi pendekatan strategis Tiongkok dalam memperkuat dan meningkatkan pengaruhnya di Indonesia melalui investasi besar-besaran, inisiatif kerja sama ekonomi, serta proyek infrastruktur strategis. Melalui perspektif strategi hedging, studi ini memberikan wawasan baru mengenai upaya Indonesia untuk mempertahankan keseimbangan antara dua kekuatan besar dunia. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan cara-cara Indonesia memanfaatkan peluang yang ada dengan kedua negara tersebut, sambil tetap menjaga otonomi dan kestabilan perekonomian nasional di tengah dinamika global yang semakin rumit.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian terkait peningkatan pengaruh Tiongkok di negara berkembang, bisa dilihat dari studi (Brautigam, 2009) dimana kehadiran Tiongkok di Afrika melalui investasi dan bantuan ekonomi memiliki dampak positif dan negatif. Tiongkok dianggap lebih fleksibel dibanding negara Barat dalam menawarkan kerja sama, khususnya pada sektor infrastruktur dan perdagangan, sehingga memberikan hubungan pragmatis yang saling menguntungkan bagi Afrika. Teori yang digunakan dalam studi tersebut yaitu Hubungan Selatan - Selatan dan Neo-Kolonialisme. Dalam studi yang lain dari (Castañeda, 2017) yang membahas tentang bagaimana Tiongkok meningkatkan pengaruhnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya didominasi Amerika Serikat, seperti Amerika Latin, melalui investasi besar dalam infrastruktur, energi, dan mineral. Pola ini juga terlihat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di mana ketergantungan ekonomi yang tumbuh pada Tiongkok berpotensi menggeser pengaruh AS dan memengaruhi dinamika regional.

Selain dua penelitian di atas, terdapat juga penelitian dari (Kang, 2009) yang menganalisis respon Korea Selatan atas peningkatan pengaruh Tiongkok khususnya di kawasan Asia Timur. Studi ini menggunakan teori "*Balance of Power*" yang menjadi dasar dalam menganalisis kebijakan luar negeri negara-negara yang menghadapi

kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah kekuatan besar. Dalam studi tersebut, Korea Selatan memilih beradaptasi dengan menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok, dibandingkan memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat. Kebangkitan Tiongkok dilihat oleh Korea Selatan sebagai peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan, bukan ancaman militer. Hal ini tercermin dalam meningkatnya kerja sama bilateral di berbagai bidang strategis. Studi ini menunjukkan bahwa kebangkitan Tiongkok berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan tradisional di Asia Timur, menggantikan dominasi Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Studi terkait dampak kerja sama Tiongkok dengan Indonesia, didapat dalam penelitian yang mengambil studi kasus proyek investasi nikel (P. Z. Fauziyyah & Paksi, 2023), dimana teori interdependensi, khususnya, interdependensi ekonomi dianggap mendorong kerja sama antarnegara sekaligus mengurangi potensi konflik. Peningkatan investasi Tiongkok dalam hilirisasi industri nikel Indonesia membawa dampak positif, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan negara, pembukaan lapangan kerja, dan masuknya investasi asing.

Oleh karena keberadaan Tiongkok di dunia global yang semakin meningkat, sebagai tambahan, Kajian yang dilakukan oleh (Sesariato, 2023) dalam *Hasanuddin Journal of International Affairs* memberikan wawasan penting mengenai peran Indonesia sebagai negara middle power dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik, khususnya terkait pengaruh Tiongkok di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis poskolonial untuk mengkaji upaya Indonesia dalam membentuk identitas dan peranannya di tengah persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sesariato menekankan bahwa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mediator yang inklusif, namun juga terlibat dalam strategi "*discursive hedging*," di mana Indonesia berusaha memanfaatkan ketegangan antara kedua negara besar tersebut untuk kepentingan nasionalnya. Hal ini konsisten dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa negara-negara seperti Indonesia dapat memanfaatkan hubungan ekonomi yang berkembang dengan Tiongkok, sambil tetap menjaga aliansi strategis dengan Amerika Serikat.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Indonesia, melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, berupaya menciptakan ruang untuk dialog dan kerja sama yang lebih inklusif, tanpa mengabaikan kepentingan Tiongkok. Pendekatan

ini mencerminkan strategi "*multilevel hedging*" yang diusulkan oleh (Kusumadewi & Wiswayana, 2024), di mana Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Studi ini menyoroti pentingnya peran ASEAN sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuatan, dengan Indonesia memanfaatkan kerja sama multilateral baik di bidang ekonomi maupun diplomasi pertahanan untuk menciptakan ruang strategis bagi keterlibatan kekuatan global tanpa terjebak dalam aliansi eksklusif.

Studi dari (Sukmawan & Pedrason, 2023) lebih lanjut menjelaskan bagaimana Indonesia mempraktikkan strategi "hedging" dalam konteks Laut Cina Selatan. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan yang mendekatkan secara ekonomi dengan Tiongkok sekaligus mempererat hubungan militer dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Strategi ini bertujuan untuk menjaga status quo di kawasan tersebut, sekaligus mengundang kekuatan besar lainnya untuk lebih memperhatikan kawasan Asia Tenggara. Pendekatan ini juga dilihat sebagai upaya untuk mengurangi potensi eskalasi konflik di tengah interdependensi ekonomi regional.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan perspektif geopolitik dan teori hubungan internasional untuk menganalisis strategi Indonesia dalam merespons peningkatan pengaruh Tiongkok dan pelemahan pengaruh Amerika Serikat dalam bidang ekonomi. Penelitian ini berfokus pada peran Indonesia sebagai *balancing state* yang berusaha menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan besar tersebut, berbeda dengan pengalaman negara-negara lain seperti Afrika dan Korea Selatan.

Melalui analisis hedging, penelitian ini menggali bagaimana strategi Indonesia memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh peningkatan investasi Tiongkok, terutama di sektor-sektor ekonomi seperti industri nikel dan infrastruktur, tanpa sepenuhnya bergantung pada salah satu kekuatan besar tersebut. Pendekatan ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu, yang lebih fokus pada hubungan bilateral, baik antara Tiongkok dan negara-negara Afrika, ataupun adaptasi negara-negara seperti Korea Selatan yang memilih lebih dekat dengan Tiongkok untuk kepentingan ekonomi.

Kajian ini juga menyoroti bagaimana Indonesia menggunakan strategi *multilevel hedging* melalui keterlibatannya dalam organisasi multilateral seperti ASEAN, untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian

ini mengungkapkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai mediator dalam ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, tetapi juga memanfaatkan posisi strategisnya untuk menciptakan ruang bagi kepentingan nasionalnya, yang berbeda dengan strategi negara-negara lain yang lebih mengedepankan hubungan bilateral langsung dengan Tiongkok.

Selain itu, penelitian ini membedah bagaimana Indonesia menjaga otonomi kebijakan luar negeri dalam menghadapi tekanan geopolitik yang semakin intens, yang selama ini sering dilihat sebagai tantangan bagi negara-negara berkembang yang berada di persimpangan pengaruh dua kekuatan besar. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan luar negeri Indonesia, yang berpijak pada pemanfaatan peluang ekonomi Tiongkok sembari mempertahankan hubungan strategis dengan Amerika Serikat, sekaligus mempertahankan otonomi dalam pengambilan keputusan.

KERANGKA TEORI

Teori Hedging dalam Hubungan Internasional

Hedging adalah sebuah strategi yang dilakukan sebuah negara untuk mengurangi resiko akibat ketidakpastian tindakan masa depan sekutunya dengan cara menggunakan seperangkat kebijakan yang selain mempromosikan kerja sama bilateral juga menciptakan kompetisi yang bertujuan untuk mempersiapkan diri mereka terhadap kemungkinan ancaman yang bisa datang dari sekutu mereka. (Pratama, 2020).

Di antara konsep-konsep ini, "hedging" telah menarik perhatian khusus dalam kebijakan dan literatur akademik karena konsep ini tampaknya secara efektif menjelaskan perilaku kekuatan sekunder. Melalui hedging, suatu negara menjalankan kebijakan penyeimbang—memperkuat kerja sama ekonomi sambil mempersiapkan konfrontasi diplomatik dan militer dengan meningkatkan kemampuan militer—untuk sementara menghindari konfrontasi eksplisit dengan negara yang berpotensi menjadi lawan (Koga, 2018).

Dalam penelitian ini, teori hedging akan menilai kebijakan luar negeri Indonesia yang berupaya menyeimbangkan hubungan dengan AS dan Tiongkok. Dengan pendekatan ini, negara berusaha membangun kerjasama ekonomi yang erat dengan berbagai pihak, sembari mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan ancaman melalui penguatan kemampuan militer atau diplomasi. Hedging juga memungkinkan

negara untuk tetap fleksibel tanpa harus secara langsung berpihak atau berkonfrontasi sehingga mereka dapat melindungi kepentingannya dalam lingkungan geopolitik yang dinamis. Bersikap netral dapat dilihat sebagai bagian dari indikasi strategi hedging, terutama ketika dominasi investasi Tiongkok di proyek – proyek strategis semakin terlihat, sementara keterlibatan Amerika Serikat di bidang serupa justru berkurang. Dengan indikator ini, teori ini memungkinkan penilaian komprehensif terhadap pilihan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pengaruh dua kekuatan besar tersebut.

Melalui teori *hedging*, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dengan menjadikan teori *hedging* sebagai alat analisis untuk menjelaskan strategi Indonesia dalam merespon pelemahan pengaruh Amerika Serikat dan peningkatan pengaruh Tiongkok.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Utama yang Menyebabkan Melemahnya Pengaruh Amerika Serikat di Indonesia dalam Bidang Ekonomi

Melemahnya pengaruh Amerika Serikat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi kebijakan AS sendiri maupun perkembangan hubungan Tiongkok-Indonesia yang semakin erat. Amerika Serikat cenderung lebih berfokus pada isu-isu domestik dan konflik di kawasan lain, seperti Timur Tengah, sehingga mengurangi keikutsertaan pembangunan ekonomi terhadap kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Tiongkok secara aktif memperluas pengaruhnya di kawasan ini melalui inisiatif ekonomi yang lebih konkret. Amerika Serikat juga lebih berorientasi pada pendekatan keamanan dalam hubungan luar negerinya, terutama terkait kebebasan navigasi di Laut China Selatan, yang meskipun penting, kurang relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia (U.S. Embassy Jakarta, 2023).

1.1 Kebijakan Proteksionis AS

Dalam dinamika perdagangan global, kebijakan ekonomi suatu negara dapat memberikan dampak signifikan terhadap mitra dagangnya, terutama ketika kebijakan tersebut bersifat proteksionis. Kebijakan proteksionis Amerika Serikat yang diterapkan oleh pemerintahan AS yang lebih fokus

pada kepentingan ekonomi dalam negeri, seperti tarif impor yang tinggi dan aturan perdagangan ketat, berdampak pada neraca perdagangan Indonesia dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. Keanggotaan Indonesia di BRICS berpotensi meningkatkan posisi tawar Indonesia terhadap kebijakan tersebut di bawah pemerintahan Trump. Rencana kebijakan proteksionis Trump juga berisiko menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, karena gangguan pada aliran investasi dan perdagangan akibat perang tarif (Grehenson, 2025).

Sikap nasionalisme dan proteksionisme yang diusung oleh Amerika Serikat, dengan slogan khas "*America First*", menjadi landasan utama dalam kebijakan ekonomi AS. Dalam berbagai pidatonya, Presiden Trump menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk melindungi pekerja dan keluarga Amerika demi meningkatkan kesejahteraan nasional. Prinsip utama yang dipegang teguh dalam kebijakan tersebut dirangkum dalam dua aturan sederhana: "*buy American and hire American*", yang berarti mendorong penggunaan produk dalam negeri dan memprioritaskan tenaga kerja Amerika. Langkah awal yang diambil dalam implementasi kebijakan ini adalah pencabutan Amerika Serikat dari perjanjian perdagangan *Trans-Pacific Partnership (TPP)*, yang menandai pergeseran menuju kebijakan perdagangan yang lebih tertutup. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian global tetapi juga mempengaruhi Indonesia, terutama dengan menurunnya angka ekspor (Pratiwi, 2017). Seiring dengan kebijakan proteksionisme yang diterapkan, dominasi ekonomi Amerika Serikat di Indonesia semakin melemah, membuka peluang bagi negara-negara lain seperti China untuk memperkuat pengaruhnya dalam hubungan perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Selain itu, pencabutan Amerika Serikat dari TPP berdampak negatif bagi Indonesia, karena menghambat akses pasar dan mengurangi potensi kerja sama dagang yang lebih luas di kawasan Asia-Pasifik.

Setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, kebijakan ekonominya yang lebih proteksionis mulai memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan global, termasuk bagi Indonesia. Salah satu

kebijakan yang menjadi perhatian utama adalah keputusan untuk tidak melanjutkan *Inflation Reduction Act* (IRA) yang sebelumnya diterapkan oleh Joe Biden. Menurut Direktur Eksekutif *Center of Economic and Law Studies* (Celios), Bhima Yudhistira, penghentian kebijakan ini berpotensi menurunkan permintaan nikel olahan dari Indonesia secara drastis. Mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu pasar penting bagi industri nikel, kondisi ini dapat menghambat prospek hilirisasi yang selama ini digenjut oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Jika situasi ini tidak diantisipasi dengan langkah strategis, ketergantungan ekspor terhadap pasar Amerika dapat menjadi tantangan serius bagi pertumbuhan sektor pertambangan dan industri hilir di Indonesia (Avisena, 2024). Kebijakan proteksionisme AS berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia, terutama melalui peningkatan tarif impor, pencabutan AS dari *TPP*, dan penghentian *Inflation Reduction Act* (IRA). Hal ini menekan daya saing ekspor Indonesia, menghambat investasi, serta memicu volatilitas nilai tukar rupiah. Sektor industri berbasis ekspor, seperti manufaktur dan nikel, berisiko mengalami penurunan permintaan, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.2 Fokus AS pada Keamanan Militer

AS lebih fokus pada hubungan militer dan aliansi keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Kementerian Pertahanan AS menegaskan komitmen AS terhadap sentralitas ASEAN sebagai pilar utama untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta menjelaskan bagaimana kerja sama keamanan dengan mitra ASEAN berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran. Menhan AS juga membahas tantangan yang mengancam visi regional tersebut, seperti tindakan koersif Tiongkok di Laut China Selatan, krisis Myanmar, proliferasi senjata Korea Utara, serta konflik di Ukraina dan Timur Tengah (U.S. Embassy Jakarta, 2023). Fokus Amerika Serikat pada aspek militer dan keamanan ini cenderung mengesampingkan kerja sama ekonomi yang lebih substansial dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, sehingga berpotensi membatasi peluang perdagangan dan

investasi yang lebih luas di kawasan. Sementara Indonesia memerlukan kerjasama ekonomi, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

1.3 Perubahan Prioritas Global AS

Faktor ketiga adalah perubahan prioritas global AS yang lebih fokus pada tantangan domestik dan masalah sosial yaitu (1) AS berusaha maksimal menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk mengatasi dan mengalahkan Tiongkok. (2) Prioritas utama kedua AS adalah menangani konflik Rusia-Ukraina. (3) AS juga berupaya memajukan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. (4) Di tingkat global, AS fokus pada solusi untuk tantangan bersama seperti migrasi ilegal, pemindahan paksa, memerangi obat-obatan sintesis, serta menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin cepat. (5) AS berusaha melindungi kepentingan dan nilai-nilai nasionalnya, terutama di sektor teknologi digital dan inovasi teknologi baru (U.S. Department of State, 2024). Prioritas global AS berdampak kepada pengurangan perhatian terhadap kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Fokus AS yang lebih tertuju pada persaingan dengan Tiongkok, konflik geopolitik di Eropa dan Timur Tengah, serta tantangan domestiknya sendiri berdampak pada melemahnya dukungan AS dalam isu-isu regional yang krusial, berkurangnya bantuan ekonomi dan perdagangan, serta meningkatnya ketidakpastian dalam hubungan bilateral, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Indonesia di kancah global.

1.4 Ketidakpastian Politik di AS

Ketidakpastian politik di AS, seperti pergantian pemerintahan yang mengarah pada perubahan kebijakan luar negeri, sering menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan ekonomi dengan Indonesia. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat cenderung memprioritaskan pembangunan hubungan yang menguntungkan dalam perdagangan antarnegara. Pergantian presiden di Amerika Serikat kerap menimbulkan perubahan dalam kebijakan luar negeri akibat perbedaan ideologi antara Partai Demokrat dan Partai Republik yang mendominasi politik negara tersebut. Kebijakan yang diterapkan oleh AS umumnya bertujuan untuk melindungi

kepentingan dalam negeri serta mempertahankan dominasinya terhadap rival-rivalnya. Sikap ofensif yang diambil oleh Amerika Serikat dalam menjaga keamanan nasionalnya juga turut memengaruhi hubungan internasional, menciptakan ketidakpastian global yang berdampak pada dinamika ekonomi di Indonesia (Dewi, 2023). Ketidakpastian politik di Amerika Serikat berisiko mengganggu stabilitas ekonomi global, memperlemah kepastian investasi, serta menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan dagang dan diplomatik dengan Indonesia, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan gejolak pasar domestik.

1.5 Perubahan Pola Investasi AS

Penurunan investasi Amerika Serikat di Asia Tenggara terjadi akibat perubahan pola investasi yang lebih berfokus pada kawasan Timur Tengah. Para ahli menilai bahwa keterlibatan AS di wilayah tersebut didorong oleh berbagai faktor strategis, termasuk kepentingan energi, pengamanan jalur perdagangan, stabilitas geopolitik, upaya kontraterorisme, serta hubungan historisnya dengan Israel. Selama beberapa dekade, AS telah memainkan peran aktif di Timur Tengah melalui berbagai kebijakan dan intervensi, seperti invasi ke Irak, operasi melawan kelompok ISIS, serta dukungan militer yang diberikan kepada Israel dan Arab Saudi (Barrucho, 2024).

Fokus AS yang lebih besar terhadap Timur Tengah berujung pada berkurangnya perhatian terhadap Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan ekonomi dan kerja sama strategis di kawasan ini. Perubahan pola investasi ini juga berpotensi melemahkan hubungan bilateral dan membuat Indonesia lebih bergantung pada mitra ekonomi lainnya, seperti China dan negara-negara anggota BRICS.

1.6 Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok yang Cepat

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat dan kebijakan ekonomi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan AS juga menjadi faktor pendukung Indonesia untuk lebih banyak menjalin kerjasama dengan

Tiongkok. Tingkat pertumbuhan PDB Tiongkok pada tahun 2023 (5,2%) lebih tinggi daripada AS yang hanya 2,9% (International Monetary Fund, n.d.). Pada tahun 2022, AS memimpin Tiongkok dengan selisih \$9 triliun dalam hal GDP nominal. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, GDP nominal Tiongkok diperkirakan akan terus meningkat dan dapat menggeser posisi Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang (Kurniawan et al., 2024).

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok membawa dampak signifikan bagi Indonesia, baik dalam aspek perdagangan, investasi, maupun ketergantungan ekonomi. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, ekspansi ekonomi Tiongkok membuka peluang lebih besar bagi peningkatan ekspor komoditas seperti nikel, batu bara, dan minyak sawit. Selain itu, investasi Tiongkok di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan manufaktur, terus meningkat, memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Faktor-Faktor Utama yang Menyebabkan Meningkatnya Pengaruh Tiongkok di Indonesia dalam Bidang Ekonomi

2.1 Belt and Road Initiative (BRI)

Tiongkok memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, dengan kerja sama erat yang terjalin antara kedua negara dalam berbagai proyek strategis. Melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok telah mengucurkan investasi besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia. Salah satu proyek paling signifikan yang didanai oleh Tiongkok adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang tidak hanya menjadi kereta cepat pertama di Indonesia tetapi juga salah satu yang pertama di kawasan Asia Tenggara. Proyek ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, Tiongkok juga terlibat dalam pendanaan berbagai proyek infrastruktur lainnya, seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan fasilitas energi. Seluruh proyek ini bertujuan untuk memperkuat jaringan transportasi, meningkatkan efisiensi

logistik, serta mendukung perkembangan ekonomi Indonesia secara lebih luas (M. Fauziyyah et al., 2024).

Semakin besarnya keterlibatan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, hubungan ekonomi antara kedua negara terus berkembang dan saling menguntungkan. Investasi yang diberikan tidak hanya mempercepat modernisasi infrastruktur nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan sektor industri terkait. Ke depan, pengelolaan proyek-proyek ini dengan transparansi dan keberlanjutan akan menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

2.2 Diplomasi *Soft Power*

Soft power menjadi elemen penting dalam pelaksanaan diplomasi publik, menjadi alat strategis dalam memperluas pengaruh suatu negara (Angreini & Indrawati, 2020). Tiongkok secara aktif menerapkan diplomasi *soft power* di Indonesia dengan menyeimbangkan pengaruh ekonomi melalui berbagai bentuk kerja sama strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Tiongkok juga berupaya mengurangi kecurigaan serta persepsi negatif di kalangan masyarakat Indonesia dengan membangun hubungan budaya yang lebih erat. Di sektor pendidikan, Tiongkok menjadi tujuan studi luar negeri terbesar kedua bagi pelajar Indonesia, dengan lebih dari 15.780 mahasiswa yang menempuh pendidikan di sana pada 2020. Peningkatan kuota beasiswa menunjukkan upaya Tiongkok dalam membangun citra positifnya. Selain itu, keterlibatan Tiongkok dalam proyek infrastruktur strategis dan bantuan kesehatan semakin memperluas pengaruhnya. Menurut BKPM, hingga April 2021, Tiongkok menjadi kreditur terbesar kedua di Indonesia dengan investasi sebesar USD 1 miliar (13,6% dari total investasi asing) (Nur Mutia & de Archellie, 2023). Diplomasi *soft power* yang diterapkan oleh Tiongkok ini secara nyata telah memperkuat hubungan bilateral kedua negara serta memperluas pengaruhnya dalam berbagai sektor strategis di Indonesia.

2.3 Kerjasama Ekonomi Jangka Panjang dan Kebijakan Ekonomi yang Lebih Fleksibel

Tiongkok terus memperluas kerjasama ekonomi jangka panjang dengan Indonesia. Kerja sama ini dirancang untuk jangka panjang, bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi negara mitra tanpa membebani kondisi fiskal mereka. Investasi Tiongkok di Indonesia terus berkembang, dengan nilai mencapai lebih dari USD 3,8 miliar pada semester pertama 2023. Investasi ini mendorong kemajuan sektor industri dan kawasan ekonomi khusus di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi, dan Bali. Kerja sama ini berpotensi meningkatkan perkembangan ekonomi di berbagai daerah tersebut (Wisnubroto, 2023).

Kebijakan ekonomi fleksibel Tiongkok yang tidak terlalu membebani Indonesia menjadikannya pilihan yang menarik. Menko Maritim dan Investasi Indonesia menyatakan bahwa pemerintah memilih Tiongkok sebagai mitra investasi setelah mempertimbangkan negara-negara lain. Tiongkok dipilih karena sistem kerja sama *business to business* (B2B) yang dapat mengurangi beban utang negara, sehingga Indonesia bisa menarik investasi tanpa menambah utang yang signifikan (Anggreani, 2021). Dengan pendekatan investasi yang lebih fleksibel dan tidak terlalu membebani fiskal, Tiongkok berhasil membangun kepercayaan sebagai mitra strategis Indonesia dalam jangka panjang. Jika hal ini terus berlanjut, dampak positifnya akan semakin terasa, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing industri nasional, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

2.4 Fokus pada Sektor Energi Hijau

Tiongkok turut memiliki andil besar dalam pengembangan energi terbarukan dan kendaraan listrik di Indonesia, memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Investasi besar Tiongkok dalam energi terbarukan sangat krusial bagi Indonesia, yang tengah menjalani transisi energi guna mencapai target 34 persen energi terbarukan pada tahun 2030. Kemajuan teknologi yang dimiliki Tiongkok memberikan dukungan penting bagi Indonesia dalam mencapai tujuan ambisius ini. Selain itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan cepat memasuki pasar kendaraan listrik Indonesia. Contohnya, Yadea dan BYD telah mendirikan fasilitas

manufaktur yang tidak hanya meningkatkan kapasitas industri otomotif Indonesia tetapi juga mendorong pengembangan infrastruktur di sektor hilir guna menghasilkan produk bernilai tambah. Dalam Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok 2023 di Beijing, telah disepakati investasi senilai US\$12,6 miliar yang mayoritas dialokasikan untuk proyek energi bersih dan baterai kendaraan listrik (Interesse, 2024).

Tak hanya itu, awal tahun 2023, Xinyi Glass Holdings dari Tiongkok mengumumkan investasi sebesar US\$11,5 miliar untuk pembangunan pabrik pengolahan pasir kuarsa di Pulau Rimpang, yang berperan penting dalam produksi panel surya. Kemudian, pada Januari 2024, BYD menginvestasikan US\$1,3 miliar untuk membangun pabrik kendaraan listrik dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun, yang diharapkan menjadi pendorong utama dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Lebih jauh, investasi Tiongkok ini didorong oleh cadangan nikel Indonesia yang melimpah, yang merupakan komponen utama dalam produksi baterai kendaraan listrik, menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi penting dalam rantai pasok global kendaraan listrik (Interesse, 2024). Investasi Tiongkok di sektor ini tidak hanya mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, tetapi juga mempercepat transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

2.5 Keberhasilan di Sektor Perdagangan

Tiongkok telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dengan total perdagangan kedua negara mencapai US\$127,8 miliar pada tahun 2023 atau sekitar Rp1.980 triliun. Dalam hubungan dagang ini, Indonesia menikmati surplus perdagangan sejak Mei 2020, yang mencerminkan kuatnya ekspor Indonesia ke Tiongkok. Selain itu, Tiongkok kini berperan sebagai pusat rantai pasok global, mengungguli negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Selama satu dekade terakhir, Tiongkok juga terbukti menjadi mitra strategis dalam pembangunan Indonesia (Sumarwan, 2024). Untuk mencapai visi dalam peningkatan ekonomi, Indonesia perlu menjaga dan memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok sebagai partner penting dan berpengaruh.

2.6 Kebijakan Non-Intervensi dalam Politik

Tiongkok mengadopsi kebijakan non-intervensi, yang berarti negara tersebut tidak akan ikut campur dalam urusan domestik negara lain. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat, yang sering kali menghubungkan bantuan dengan isu-isu politik, lingkungan, dan Hak Asasi Manusia. Kebijakan non-intervensi Tiongkok menekankan prinsip non-keterlibatan dalam konflik internal negara lain (Maudisha, 2024).

Sikap Amerika yang mengaitkan kerja sama dengan isu politik pernah berdampak langsung pada Indonesia. Contohnya, Amerika memberlakukan embargo terhadap suku cadang pesawat tempur F-16 karena dugaan pelanggaran HAM, memaksa Indonesia mencari alternatif ke Rusia. Sebaliknya, kerja sama dengan Tiongkok memberi Indonesia keleluasaan untuk fokus pada pembangunan ekonomi tanpa tekanan politik dari pihak luar (Nasution, 2024). Dengan kebijakan non-intervensinya, Tiongkok menjadi mitra yang lebih fleksibel bagi Indonesia dalam membangun perekonomian tanpa tekanan politik eksternal. Pendekatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur, perdagangan, dan investasi dengan lebih leluasa, tanpa terhambat oleh persyaratan yang sering menyertai bantuan dari negara-negara Barat.

3. Strategi Hedging Indonesia dalam Merespon Pelemahan Pengaruh Amerika Serikat Dan Peningkatan Pengaruh Tiongkok Dalam Bidang Ekonomi

Kebijakan luar negeri suatu negara dirancang untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan nasionalnya, meskipun arah dan prioritasnya sangat bergantung pada pemimpin yang berkuasa saat itu. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, negara-negara serta aktor-aktor di dalamnya menjalankan berbagai bentuk kerja sama, baik bilateral, trilateral, regional, maupun multilateral. Selain itu, tujuan politik luar negeri suatu negara bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan situasi global dan domestik (Angreini & Indrawati, 2020).

Dalam konteks geopolitik yang terus berubah, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dari melemahnya pengaruh Amerika Serikat serta meningkatnya dominasi ekonomi Tiongkok. Untuk menjaga keseimbangan dalam dinamika global

ini, Indonesia menerapkan strategi hedging, yaitu dengan tidak berpihak sepenuhnya pada salah satu kekuatan besar, tetapi membangun hubungan yang fleksibel dengan keduanya. Di satu sisi, Indonesia tetap menjaga kerja sama ekonomi dan investasi dengan Tiongkok, yang telah menjadi mitra dagang utama. Namun, di sisi lain, Indonesia juga mempertahankan hubungan strategis dengan Amerika Serikat, terutama dalam bidang pertahanan, teknologi, dan investasi sektor swasta. Pendekatan hedging ini memungkinkan Indonesia untuk memperoleh manfaat ekonomi dari Tiongkok tanpa sepenuhnya bergantung padanya, sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat guna menghindari risiko ketergantungan yang berlebihan pada satu kekuatan global.

Dalam penerapan strategi hedging, Indonesia memanfaatkan peluang strategis dengan posisinya yang berada di Jalur Sutra Maritim, yang menjadikannya bagian penting dalam strategi Belt and Road Initiative (BRI). Hal ini selaras dengan kepentingan nasional Indonesia serta agenda ASEAN dalam meningkatkan konektivitas regional. Sejalan dengan itu, Indonesia juga memiliki rencana ambisius untuk memperkuat infrastruktur, terutama karena Presiden Joko Widodo menjadikan sektor maritim sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional (Mursitama & Ying, 2021).

Selain investasi infrastruktur, Tiongkok juga mengembangkan pendekatan soft power, yang berupaya untuk melengkapi pengaruh ekonomi dan politiknya yang semakin besar dengan pertukaran pendidikan, profesional, budaya, dan daya soft power lainnya (Natalegawa & Poling, 2024). Melalui berbagai bentuk kerja sama ekonomi, Tiongkok berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk dalam sektor infrastruktur, energi terbarukan, dan manufaktur. Sementara itu, Indonesia tetap mempertahankan kemitraannya dengan Amerika Serikat yang dinilai krusial dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta keseimbangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara (Mubah, 2019a).

Menurut Novotny (2010), kalangan elit Indonesia melihat kebangkitan Tiongkok sebagai fenomena yang membawa dampak positif sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia. Di satu sisi, kehadiran Tiongkok memungkinkan Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Namun, di sisi lain, kedekatan ekonomi yang semakin erat dengan Tiongkok dapat menimbulkan

risiko ketergantungan baru yang perlu dikelola dengan hati-hati (Mubah, 2019b). Oleh karena itu, meskipun hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok semakin kuat, pemerintah Indonesia tetap menjaga keseimbangan dengan menjalin kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat, termasuk melalui mekanisme multilateral.

Salah satu bentuk konkret dari strategi ini adalah peran Indonesia dalam East Asia Summit (EAS). Kekhawatiran akan dominasi Tiongkok dalam forum ini mendorong Indonesia untuk mengundang Amerika Serikat menjadi anggota pada tahun 2011. Kehadiran Amerika Serikat dalam forum ini menunjukkan bahwa negara tersebut tetap ingin mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara guna menjaga kepentingan strategisnya di kawasan. Bagi Indonesia, keterlibatan Amerika Serikat dalam EAS menjadi langkah penting dalam memastikan stabilitas keamanan kawasan di tengah pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat (Mubah, 2019b).

Selain itu, posisi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar dan investor terbesar kedua di Indonesia semakin menguat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berisikan Kerja Sama Sektor Industri antara Kementerian Perindustrian Indonesia dan Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) Republik Rakyat Tiongkok. Kesepakatan ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk industri otomotif, baterai lithium, semikonduktor, bio-prospektif, farmasi, serta pengembangan teknologi industri. Kerja sama ini menunjukkan bahwa Indonesia melihat Tiongkok sebagai mitra utama dalam mendorong pertumbuhan sektor industri berbasis teknologi tinggi (Nurdifa, 2023).

Di sisi lain, hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami tantangan tersendiri. Salah satu indikasinya adalah forum kerja sama bilateral melalui Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang terhenti sejak 2018 (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan bukan lagi menjadi fokus utama dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Namun, meskipun kerja sama ekonomi tidak menjadi prioritas, hubungan strategis dalam bidang pertahanan, keamanan, dan

teknologi tetap terjaga sebagai bagian dari strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

Dengan menerapkan strategi hedging, Indonesia mampu mengambil manfaat dari kedua kekuatan besar tanpa terjebak dalam ketergantungan sepihak. Langkah ini memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Keberlanjutan strategi ini akan sangat bergantung pada fleksibilitas diplomasi Indonesia dalam menavigasi perubahan politik dan ekonomi internasional di masa mendatang.

KESIMPULAN

Strategi Indonesia dalam merespons pelemahan pengaruh Amerika Serikat dan peningkatan pengaruh Tiongkok dalam bidang ekonomi dapat dipahami melalui pendekatan hedging yang bijak dan fleksibel. Kebijakan proteksionis AS yang mencakup tarif impor tinggi dan persyaratan perdagangan yang ketat menambah tantangan bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Meskipun demikian, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan AS, khususnya dalam aspek militer dan keamanan, sambil memperkuat kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Investasi besar dari Tiongkok dalam sektor energi terbarukan, pembangunan pabrik baterai, dan proyek infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung menawarkan alternatif yang menguntungkan bagi Indonesia, sementara kebijakan non-intervensi Tiongkok memberikan ruang bagi Indonesia untuk fokus pada pembangunan tanpa terikat dengan syarat-syarat politik yang lebih kompleks dari AS.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionis AS, sembari membuka peluang untuk memperkuat kerjasama ekonomi jangka panjang dengan Tiongkok. Dengan meningkatnya ketidakpastian politik di AS dan perubahan prioritas globalnya, Indonesia semakin memanfaatkan kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan Tiongkok, yang menawarkan kebijakan investasi lebih fleksibel dan bersifat long-term. Dalam hal ini, Indonesia mampu menjaga diversifikasi sumber perdagangan dan investasi dari kedua negara besar, mengurangi ketergantungan pada satu pihak, dan memperkuat stabilitas ekonomi domestik.

Dengan kebijakan hedging yang cermat, Indonesia tidak hanya mampu memanfaatkan peluang dari kedua negara besar, tetapi juga mengurangi dampak negatif

dari ketidakpastian ekonomi global. Indonesia dapat terus memperkokoh fondasi ekonomi nasional melalui kerjasama ekonomi yang menguntungkan, terutama dengan Tiongkok, yang memberikan solusi investasi lebih fleksibel dibandingkan dengan AS namun Indonesia tetap menjalin hubungan strategis dengan AS di bidang keamanan. Sebagai negara yang terus berkembang, strategi hedging Indonesia ini memungkinkan negara ini untuk memanfaatkan kekuatan dari kedua belah pihak tanpa bergantung sepenuhnya pada satu negara, menciptakan keseimbangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreani, R. (2021). *Terungkap! Alasan Luhut Pilih Investasi China Ketimbang Amerika Serikat*. *Bisnis.Com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210730/9/1424067/terungkap-alasan-luhut-pilih-investasi-china-ketimbang-amerika-serikat>
- Angreini, Y., & Indrawati, I. (2020). Diplomasi Publik Indonesia Melalui Bali Democracy Forum Sebagai Bagian Dari Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. *Global Insight Journal*, 5(1), 39–58. <https://doi.org/10.52447/gij.v5i1.3732>
- Arifin, K. L., Rahmadan, Y., & Internasional, H. (2024). *Kebijakan Indonesia Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) Sebagai Kebijakan yang Rasional*. 13(3), 449–464.
- Avisena, M. I. R. (2024). *Trump Disebut Beri Efek Negatif ke Indonesia*. Metro TV. <https://www.metrotvnews.com/read/b21CVaoy-trump-disebut-beri-efek-negatif-ke-indonesia>
- Barrucho, L. (2024). *Mengapa Timur Tengah penting bagi Amerika Serikat?* BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj7dk81v30ko#:~:text=Kepentingan ekonomi dan rute maritim,dan konflik di kawasan ini?>
- Brautigam, D. (2009). *The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa*. Oxford University Press.
- Castañeda, N. (2017). New Dependency?: Economic Links between China and Latin America. *Issues and Studies*, 53(1), 1–33. <https://doi.org/10.1142/S101325111740001X>
- Dewi, I. D. A. I. S. (2023). *Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era Donald Trump dan Joe Biden*. Kumparan. <https://kumparan.com/sunari-dewi/perbedaan-kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-era-donald-trump-dan-joe-biden-20LeOzdzsJg>
- Fauziyyah, M., Hidayat, T., & Panorama, A. D. (2024). The Cooperation Between Indonesia-China Through The Belt And Road Initiative (Bri) In Infrastructure Development In Indonesia In 2019-2023. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1 SE-Articles). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2390>
- Fauziyyah, P. Z., & Paksi, A. K. (2023). Dampak Kerja Sama Indonesia-China Dalam Proyek Investasi Nikel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kedua Negara. *Jurnal*

- Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(1), 86–105. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.4279>
- Ghifari, R. (2019). *Dinamika Hubungan Indonesia dengan Amerika*. Geotimes. <https://geotimes.id/opini/dinamika-hubungan-indonesia-dengan-amerika/>
- Grehenson, G. (2025). *Kebijakan Perang Tarif Donald Trump Berpotensi jadi Ancaman Ekonomi Global*. Universitas Gajah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/kebijakan-perang-tarif-donald-trump-berpotensi-jadi-ancaman-ekonomi-global/>
- Interesse, G. (2024). *China's Investments in Indonesia: 2024 Outlook*. ASEAN Briefing. <https://www.aseanbriefing.com/news/chinas-investments-in-indonesia-2024-outlook/>
- International Monetary Fund. (n.d.). *World Economic Outlook: Real GDP Growth (NGDP_RPCH)*. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/CHN/USA
- Kang, D. C. (2009). Between balancing and bandwagoning: South Korea's response to China. *Journal of East Asian Studies*, 9(1), 1–28. <https://doi.org/10.1017/s1598240800002794>
- Kementerian Perdagangan RI. (2023). Pertemuan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat, Mendag Zulkifli Hasan: Kedua Negara Sepakat Gelar Pertemuan TIFA pada 2024. *Kementerian Perdagangan RI*.
- Khoirunnisa, K. (2022). Diplomasi Tiongkok Dalam Meraih Pengaruh Di Kawasan Asia Tenggara. *Global Insight Journal*, 7(2), 137–154. <https://doi.org/10.52447/gij.v7i2.7230>
- Koga, K. (2018). The Concept of “Hedging” Revisited: The Case of Japan's Foreign Policy Strategy in East Asia's Power Shift. *International Studies Review*, 20(4), 633–660. <https://doi.org/10.1093/isr/vix059>
- Kurniawan, M. A., Sari, D. N., & Fauziyah, N. (2024). Tinjauan Terhadap Kebijakan Ekonomi Tiongkok Sebagai Pemuncak Global: Analisis Perbandingan Dengan Amerika Serikat. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v3i1.6360>
- Kusumadewi, H., & Wiswayana, W. M. (2024). Multilevel Hedging for Middle-Regional Power: Indonesia Ascent Toward Powerhood Through Hedging. *Indonesian Journal of International Relations*, 8(2), 392–413. <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i2.591>
- Maudisha. (2024). *Belt and Road Initiative dan Implikasinya Terhadap Tata Ekonomi dan Politik Global*. Universitas Indonesia. <https://www.ui.ac.id/belt-and-road-initiative-dan-implikasinya-terhadap-tata-ekonomi-dan-politik-global/>
- Mubah, A. S. (2019a). Indonesia's Double Hedging Strategy toward the United States-China Competition: Shaping Regional Order in the Indo-Pacific? *Issues and Studies*, 55(4), 1–27. <https://doi.org/10.1142/S1013251119400071>
- Mubah, A. S. (2019b). *Strategi Indonesia Hadapi Kompetisi AS-China*. Unair News. <https://unair.ac.id/strategi-indonesia-hadapi-kompetisi-as-china/>
- Mursitama, T. N., & Ying, Y. (2021). Indonesia's Perception and Strategy toward China's OBOR Expansion: Hedging with Balancing. *Chinese Economy*, 54(1), 35–47. <https://doi.org/10.1080/10971475.2020.1809816>
- Nasution, K. B. (2024). *Alasan Indonesia Lebih Baik Kerja Sama Dengan Tiongkok Dibanding Dengan Amerika*. Empiris.Id. <https://www.empiris.id/opini/94495206/alasan-indonesia-lebih-baik-kerja-sama->

- dengan-tiongkok-dibanding-dengan-amerika?
- Natalegawa, A., & Poling, G. B. (2024). *U.S. and Chinese Soft Power and Influence in Southeast Asia*. Center for Strategic & International Studies. <https://www.csis.org/analysis/us-and-chinese-soft-power-and-influence-southeast-asia>
- Nur Mutia, R. T., & de Archellie, R. (2023). Reassessing China's Soft Power in Indonesia: A Critical Overview on China's Cultural Soft Power. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2178585>
- Nurdifa, R. A. (2023). *RI-China Perkuat Kerja Sama Baterai Litium hingga Semikonduktor*. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231204/257/1720873/ri-china-perkuat-kerja-sama-baterai-litium-hingga-semikonduktor>
- Pratama, A. (2020). Praktik Hedging dan Dampaknya Terhadap Superpower: Dalam Konteks Asia Pasifik. *Jurnal Sentris*, 1(1), 50–61. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4128.50-61>
- Pratiwi, D. R. & A. N. A. (2017). Slogan “ America First ” dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia “ PR ” Pemerintah Mendorong 40 Persen Subsidi KUR ke Sektor Produktif. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, II*, 16. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-26.pdf>
- Sesariato, K. A. (2023). Mendayung (Memaniplulasi Wacana) di Antara Dua Karang: Discursive hedging Indonesia dalam Indo-Pasifik. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(1), 55–67. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i1.25635>
- Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2023). Assertively Hedging? Indonesia's Motives and Practices in the South China Sea. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 701. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.15>
- Sumarwan, A. (2024). *Cina tetap jadi mitra strategis kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia*. The Conversation. <https://theconversation.com/cina-tetap-jadi-mitra-strategis-kebijakan-ekonomi-luar-negeri-indonesia-241907>
- Tri Andika, M., & Nur Aisyah, A. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Indonesian Perspective*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.14710/ip.v2i2.18477>
- U.S. Department of State. (2024). *FY2025 Budget: U.S. Global Funding Priorities*. US. Department of State. <https://www.state.gov/briefings-foreign-press-centers/fy25-budget-us-global-funding-priorities>
- U.S. Embassy Jakarta. (2023). *Amerika Serikat dan Indonesia Tanda Tangan Pengaturan Kerja Sama Pertahanan*. U.S. Embassy Jakarta. <https://id.usembassy.gov/id/amerika-serikat-dan-indonesia-tanda-tangani-pengaturan-kerja-sama-pertahanan/>
- Umar, A. R. M. (2023). The rise of the Asian middle powers: Indonesia's conceptions of international order. *International Affairs*, 99(4), 1459–1476. <https://doi.org/10.1093/ia/iiaad167>
- Wisnubroto, K. (2023). *Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kerja Sama dan Investasi, Apa Saja?* *Indonesia.Go.Id*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7686/indonesia-dan-tiongkok-perkuat-kerja-sama-dan-investasi-apa-saja?lang=1>